

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2020.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Media Buana, 2022.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 110
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan ke 12*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajaran Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)

B. Jurnal

- Luh Putu Cynthia Gitayani, *Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien*, Acta Comitatus Vol. 3 No. 3 (2018)
- Triana Handayani, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya*, Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2019) , hlm. 37
- Tiara Hasravevy, *Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru*, Recital Review Vol. 3 No.1 (2021)

- Neneng Saptika Dagis, Hambatan dan Upaya Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Notaris di Kota Banjarmasin, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 6 No. 1 (2022),
- Enny Mirfa, *Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan di Negara Belanda*, *Jurnal Ilmiah Research Sains* Vol. 2 No. 2 (2016),
- Nafi Rizka Ananda, *Etika Profesi Notaris Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 13 No. 12 (2025),
- F. Renaldi & T. M. P. Allagan, *Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri Oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda*, *UNES Journal of Swara Justisia* Vol. 8 No. 1 (2024),
- Richard Nahuis; *Entry and Competition in the Dutch Notary Profession*, *International Review of Law and Economics*, Vol. 30 No. 2 (2025),
- Fahmi Ihsan Margolang, *Sistem Pengawasan Profesi Notaris di Indonesia dan Belanda: Studi Komparatif atas Mekanisme Akuntabilitas dan Etika Jabatan, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2 No. 3 (2025),
- Ferdinand Renaldi, *Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda*, *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 8 No. 1 (2024),
- Mohammad Abdul Mukhyi, *Metode Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, (2022),
- Hendra Setiawan, *Konsep Pengawasan dalam Administrasi Publik Menurut The Liang Gie*, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10 No. 2, 2013,

Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 4 (2015),

Harun Arrasyid, Pengaruh Pemberian Sanksi terhadap Disiplin dan Motivasi Kerja Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok, *Jurnal on Education* Vol. 4 no. 4 (2022). Hlm. 2042

Intan Annisa, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 5 No. 2 (2024). Hlm.48

Tamaulina Br. Sembiring & Irmawati., dkk, *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023, hlm. 62-66.

Lestari, A. P. (2023). “Fungsi Majelis Pengawas Pusat dalam Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Lex Privatum*, 11(1), 88–97.

Dwi Puspita Sari, “Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol. 6, No. 1 (2021): 45–54

Rahmawati, N. (2022). “Peran Majelis Pengawas Wilayah dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 9(2), 123–134.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2025

Belanda

Wet op het Notarisambt (WNA)

Beroeps- en Gedragsregels voor Notarissen en Kandidat-Notarissen

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Regeling Kamer voor het Notariaat

Code of Notary Ethics (Uni Eropa)